



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id
Kode Pos 78111 Pontianak

RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja ini disusun sebagai langkah pelaksanaan perencanaan tahun 2025 yang merupakan turunan dari Renstra 2024-2026 yang sebelumnya telah disusun sebagai tindaklanjut dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak, sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan di bidang pengawasan selama tahun 2025 dengan menerjemahkan perencanaan pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak di bidang Pengawasan.

Renja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)".

Pontianak, Desember 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Tahun 2024	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	II-11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025	II-20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-26
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)	III-7
4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Kota Pontianak	III-8
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK	IV-1
BAB V : PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Inspektorat Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Tahapan penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai berikut

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
2. Persiapan penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
3. Penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
4. Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak mencakup :
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak;

- Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak.
- Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kota Pontianak.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 senantiasa ada keterkaitan dengan dokumen RKPD Kota Pontianak dan Renstra Inspektorat Kota Pontianak serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Penetapan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan dan diverifikasi oleh Bappeda Kota Pontianak

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
25. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117). contoh perwa tentang tupoksi.
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
28. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis ... Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025, proses penyusunan renja, keterkaitan antar Renja dengan RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Kota Pontianak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Kota Pontianak.
- 1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak.
- 1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kota Pontianak, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Pontianak

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Kota Pontianak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Kota Pontianak dan / atau realisasi APBD untuk Inspektorat Kota Pontianak. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Perubahan Renstra Inspektorat Kota Pontianak; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Pontianak

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksana musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kota Pontianak

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat kota Pontianak tahun 2023 (tahun n-2) dan realisasi Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan (LAKIP) Inspektorat kota Pontianak tahun 2023 dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat kota Pontianak. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, Indikator Pertama yaitu Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK dengan capaian sebesar **76,33%** tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 83%. Kemudian pada Indikator kedua yaitu Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP sebesar **18,63%** juga tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Penyebab tidak terpenuhinya target kinerja tersebut adalah temuan yang ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi dan terdapat temuan tahun-tahun lawas yang sulit ditindaklanjuti karena data dukung tidak ada dan pihak yang terlibat sudah

meninggal sementara pengajuan penghapusan terhadap temuan-temuan tersebut memerlukan pengkajian mendalam.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Kategori Hasil Evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan Score 3 pada Orbrik Binaan Irban terrealisasi sebesar **100%**
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Indikator :
 - Persentase Unit Kerja Pada Orbrik Binaan Irban yang Memenuhi Standar untuk Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/WBBM terealisasi sebesar **100%**
 - Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/Bimtek minimal 120 Jam/Tahun per APIP terealisasi sebesar **100%**
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan Terealisasi Sebesar **99%.**

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sebesar **76,33%** dari target 83% serta Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti sebesar **18,63%** dari target 100%. Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sangat tergantung kepada komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah, pihak terperiksa termasuk ASN yang sudah pensiun, pindah domisili bahkan yang sudah meninggal sehingga sulit melakukan konfirmasi, klarifikasi serta pemenuhan data dukung.
- Kendala teknis lainnya yang termasuk faktor penyebab tidak terpenuhinya target yang ditetapkan antara lain kurangnya jumlah APIP dari total kebutuhan APIP sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh tim yang sudah dibentuk harus dipecah lagi menjadi tim yang lebih kecil supaya dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang termasuk hal baru kadang tugas-tugas baru

tersebut sudah harus dilaksanakan oleh APIP padahal diklat yang diberikan kepada APIP belum memenuhi kebutuhan APIP untuk melaksanakan tugas baru tersebut. Selain itu, sulitnya pemenuhan data dari *auditee* serta sering berubahnya jadwal PKPT karena adanya pemeriksaan wajib ataupun reguler dari pimpinan maupun pemerintah pusat yang bersifat urgent dan mendesak juga menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya target yang ditetapkan dalam Renja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Perubahan Renstra Perangkat Daerah

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai akibat tidak tercapainya target program dan kegiatan pada renja adalah berkurangnya peluang pencapaian target Perubahan Renstra pada akhir periode dan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini disebabkan :
 - Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya berubah.
 - Adanya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berubah dari tahun sebelumnya.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan

- Meningkatkan koordinasi dengan BPK, APIP dan perangkat daerah yang terlibat temuan dalam bentuk pendampingan, asistensi, konsultasi, serta penyampaian surat panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang terlibat temuan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang sesuai rekomendasi. Sedangkan upaya penyelesaian temuan tahun-tahun lawas sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat kajian penghapusan dengan merujuk pada Permenkeu nomor 137/PMK.06/2022.
- Kontrol terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas temuan tersebut semakin diperketat dan diintensifkan dengan cara menagih progres tindak lanjut setiap 5 hari kerja kepada Perangkat Daerah terkait serta memonitoring secara periodik data temuan tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Indikator Sasaran Kinerja Inspektorat Kota Pontianak :

- 1. Persentase Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target 31,25% atau 10 Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai dengan kategori memuaskan. Hal ini dapat dihitung dari banyaknya jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi LAKIP nya dengan kategori memuaskan dibagi dengan banyaknya jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak (32 Perangkat Daerah).
- 2. Nilai Maturitas SPIP dengan target 3,5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan berdasarkan PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat Kota Pontianak			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026													
Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan													
	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan			31,25% (10 PD)	62,50% (20 PD)	100% (32 PD)				31,25% (10 PD)	62,50% (20 PD)	100% (32 PD)	
Indikator Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi													
	Nilai Maturitas SPIP	Score 3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4	3,41	3,42				3,4	3,41	3,42	
Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan													
	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien			100	100	100				100	100	100	
	Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Score 3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	100	100				100	100	100	

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat Kota Pontianak			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi													
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3				3	3	3	
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko			80	90	100				80	90	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kota Pontianak agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Capaian Score Maturitas SPIP belum maksimal	Kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal	Upaya peningkatan kompetensi APIP belum mencakup seluruh pegawai sehingga kinerjanya sebagai Penjamin Kulitas belum maksimal
			Kualitas perencanaan Perangkat Daerah belum memenuhi indikator SMART dan penetapan target kinerja belum memperhatikan capaian tahun lalu.
2	Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP belum berdampak terhadap efektifitas	Hasil temuan pemeriksaan yang berulang	Kualitas pemeriksaan dan pengawasan kurang memadai
			Sistem Pengendalian internal SKPD masih lemah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Pemerintah Kota Pontianak		
3	Capaian Level Kapabilitas APIP belum maksimal	Kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek Kurang maksimalnya pendampingan ke Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap perencanaan periode tahun sebelumnya, terdapat 6 (enam) Isu Strategis pada Inspektorat Kota Pontianak yaitu sebagai berikut.

- Isu Strategis berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:
 - Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD.
 - Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
 - Reviu LKPD secara berkelanjutan.
 - Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko.
 - Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (*probity audit*).

Pengendalian Internal diinterpretasikan dalam Score Maturitas SPIP yang merupakan bentuk penilaian kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penilaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2023 berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan secara mandiri (Penilaian Mandiri) oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak melalui aplikasi online berbasis website pada alamat <https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> yang mana hasil penilaian mandiri tersebut dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Tim SPIP Terintegrasi di Inspektorat Kota Pontianak sebelum disampaikan ke BPKP untuk dievaluasi lebih lanjut dalam penentuan nilai akhir Skor Maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Pontianak. Penilaian Skor Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan hasil akhir penilaian oleh BPKP dalam satuan

Level. Skor Maturitas SPIP Terintegrasi hasil evaluasi BPKP melalui mekanisme penilaian berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 ini hanya menampilkan Skor Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Kota Pontianak sedangkan skor pada masing-masing Perangkat Daerah tidak dimunculkan oleh BPKP sehingga perumusan Skor Maturitas SPIP Terintegrasi mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak, Skor Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Pontianak tahun 2023 berada pada Level 3 (Terdefinisi) telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3,354 atau telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)
 - b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,060 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi)
 - c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,360 (Berkembang)
- Skor Maturitas SPIP masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penilaian Skor Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian skor maturitas SPIP sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
- a. Sasaran Strategis pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome dan indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup;
 - b. Pengelolaan Risiko Strategis baik pada tingkat Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal;
 - c. Pengelolaan Risiko di Pemerintah Kota Pontianak belum mencakup Pengelolaan Risiko *Fraud*;
 - d. Pengelolaan Risiko belum melekat pada proses bisnis Pemerintah Kota Pontianak;
 - e. Kebijakan anti korupsi telah diimplementasikan tetapi belum menjangkau seluruh kegiatan utama setiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak;
 - f. Kegiatan edukasi anti korupsi belum dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terstruktur pada Perangkat Daerah.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Capaian Skor Maturitas SPIP adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja melalui asistensi
 - b. Melakukan sosialisasi dan asistensi terkait SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan IEPK
 - c. Melakukan pendampingan dan asistensi SPIP Terintegrasi bagi Perangkat Daerah yang difokuskan pada Manajemen Risiko dan IEPK
2. Isu Strategis berkaitan dengan Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
 3. Isu Strategis berkaitan dengan Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Fokus Inspektorat Kota Pontianak adalah menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal (APIP) maupun eksternal (BPK) dengan peningkatan pengawasan, koordinasi, komitmen dan keseriusan pimpinan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan karena temuan yang ditindaklanjuti belum sesuai rekomendasi dan terdapat temuan tahun-tahun lawas (di bawah tahun 2004) yang sulit ditindaklanjuti karena data dukung tidak ada dan pihak yang terlibat sudah meninggal sementara pengajuan penghapusan terhadap temuan-temuan tersebut memerlukan pengkajian mendalam. Sebagai upaya peningkatan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Kota Pontianak telah menyampaikan Surat Panggilan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka mempercepat TLHP BPK RI yang sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan upaya penyelesaian temuan tahun-tahun lawas sedang dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat kajian penghapusan dengan merujuk pada Permenkeu nomor 137/PMK.06/2022.
 4. Isu Strategis berkaitan dengan Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintah.
 5. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi Inspektorat Kota Pontianak yaitu berkaitan dengan Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu Strategis ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan

menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. Pada tahun 2022 tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 3 (terdefinisi) untuk semua elemen berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pontianak dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/LHP-516/PW14/6/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kota Pontianak. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kapabilitas APIP yang berada pada Level 3 (terdefinisi). Adapun saran yang disampaikan BPKP kepada Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan SDM dengan melakukan evaluasi ANJAB/ABK Inspektorat Kota Pontianak; evaluasi peraturan/ kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari identifikasi, rekrutmen SDM, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi (sertifikasi), standar kompetensi, pemberian penghargaan, dan partisipasi aktif SDM APIP pada organisasi profesi/asosiasi/Lembaga serta Menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan PKS.
 - b. Meningkatkan praktik professional dengan Menyusun perencanaan pengawasan berbasis manajemen risiko terintegrasi (Pemda dan OPD); melakukan evaluasi Kebijakan Pedoman Kendali Mutu Inspektorat Kota Pontianak.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja dengan melakukan evaluasi Renja dan RKA APIP; evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari sistem pelaksanaan anggaran; evaluasi sistem pengukuran kinerja individu/SKP; evaluasi sistem pengukuran kinerja APIP; evaluasi LAKIP Inspektorat.
 - d. Meningkatkan budaya dan hubungan organisasi dengan melakukan evaluasi pedoman dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan/ audit di Lingkungan Inspektorat; melakukan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari pola koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal.
 - e. Meningkatkan struktur tata Kelola dengan menyampaikan usulan dan perencanaan pendanaan yang cukup sesuai Permendagri nomor 27 tahun 2021; evaluasi Piagam Audit Internal; evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari pelaporan antara APIP dan Pemerintah.
6. Penilaian indeks anti korupsi dapat dinilai dari capaian MCP Korsupgah, Stranas PK dan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam mencapai nilai indeks yang maksimal telah dilakukan upaya kolaborasi, koordinasi dan kerjasama dari Perangkat

Daerah serta komitmen dari Walikota Pontianak sehingga mampu meningkatkan indeks capaian setiap tahunnya.

Berdasarkan Analisis SWOT yang menggambarkan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh Inspektorat Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada
Inspektorat Kota Pontianak

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN(<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Kualitas Sarana/Alat Pengawasan dan SDM yang masih belum memadai
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian asistensi	3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi
5	Struktur Organisasi yang sudah sesuai kebutuhan	5	Masih terdapat tumpang tindih pekerjaan dan penumpukan pekerjaan pada beberapa orang
PELUANG (<i>Opportinuties</i>)		TANTANGAN(<i>Threaths</i>)	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2	Adanya dukungan yang kuat dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelas dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3	Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi
4	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas.	4	Kapabilitas APIP Kota pada Level 3 menuju ke Level 4
5	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

Kecukupan anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan akan berpengaruh pula kepada pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang pada

akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak.

Persentase ketersediaan anggaran pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2023 sebesar 0,61 % dari APBD. Persentase tersebut masih di bawah ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD Tahun 2023 yang mengamanatkan agar fungsi pengawasan dianggarkan sebesar 0,75 % dari APBD.

Dengan ketersediaan anggaran yang minim tersebut diharapkan adanya langkah-langkah dari pihak yang berwenang untuk mencukupi ketersediaan anggaran sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tersebut guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Diharapkan dengan anggaran yang cukup, akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak.

Dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Inspektorat Kota Pontianak mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

- Hasil evaluasi capaian Renja tahun sebelumnya
- Analisa isu-isu strategis
- Analisa SWOT
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Tugas-tugas mandatori
- Aspirasi masyarakat (jika ada)
- Hasil rapat koordinasi internal terkait perencanaan

Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak
dan Pencapaian Perubahan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6,01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	-	95	-	-	95	-	-
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	-	18	-	-	18	-	-
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	-	3		-	3	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	-	46	-	-	46	-	-
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	-	12	-	-	12	-	-
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	-	5	-	-	5	-	-
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43	-	31	-	-	31	-	-
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	-	17	-	-	17	-	-
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-	4	-	-	4	-	-
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	-	10	-	-	10	-	-
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	-	15	-	-	15	-	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	-	3	-	-	3	-	-
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	-	9	-	-	9	-	-
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	-	58	-	-	58	-	-
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	1	-	-	1	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien	100	-	100	-	-	100	-	-
		Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37	-	37	-	-	37	-	-
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44	-	44	-	-	44	-	-
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129	-	129	-	-	129	-	-
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	-	1	-	-	1	-	-
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.02.2.01.0007	Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8	-	8	-	-	8	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	-	20	-	-	20	-	-
6.01.03	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	-	3	-	-	3	-	-
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	100	-	90	-	-	90	-	-
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.03.2.01.0001	Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	-	2	-	-	2	-	-
6.01.03.2.01.0002	Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4	-	4	-	-	4	-	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100	-	100	-	-	100	-	-
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	-	1	-	-	1	-	-

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	-	32	-	-	32	-	-
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi	8	-	8	-	-	8	-	-
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	-	2	-	-	2	-	-

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana Inspektorat Kota Pontianak melakukan proses dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Kota Pontianak
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program, kegiatan dan sub kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 pada Satuan Kerja Inspektorat Kota Pontianak dibawah ini.

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyelenggaraan Pengawasan	Pontianak	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien	100%	567.798.000	Penyelenggaraan Pengawasan	Pontianak	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien	100%	567.798.000	
		Pontianak	Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100%			Pontianak	Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	100%		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pontianak	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100%	386.798.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pontianak	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100%	386.798.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 LHP	150.250.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 LHP	150.250.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 LHP	43.950.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 LHP	43.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Reviu Laporan Kinerja	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129 LHR	34.700.000	Reviu Laporan Kinerja	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129 LHR	34.700.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 LHR	17.300.000	Reviu Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 LHR	17.300.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Pontianak	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	61.448.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Pontianak	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	61.448.000	
	Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	79.150.000	Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	79.150.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pontianak	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	181.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pontianak	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	181.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	110.500.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	110.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			yang Ditangani					yang Ditangani			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 LHP	70.500.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 LHP	70.500.000	
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pontianak	Level Kapabilitas APIP	Level 3	561.685.000	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pontianak	Level Kapabilitas APIP	Level 3	561.685.000	
		Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	90%			Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	90%		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Pontianak	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	5.775.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Pontianak	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	5.775.000	
	Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan	Pontianak	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi	3.025.000	Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan	Pontianak	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi	3.025.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			wasan yang Disusun					wasan yang Disusun			
	Perumusan kebijakan teknis d bidang Fasilitas Pengawasan	Pontianak	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	2.750.000	Perumusan kebijakan teknis d bidang Fasilitas Pengawasan	Pontianak	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	2.750.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Pontianak	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100%	555.910.000	Pendampingan dan Asistensi	Pontianak	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100%	555.910.000	
	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 PD	10.190.000	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 PD	10.190.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 PD	333.650.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 PD	333.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pontianak	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	206.700.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pontianak	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	206.700.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	5.370.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	5.370.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	9.540.039.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	9.540.039.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	30.102.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	30.102.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dok	5.995.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dok	5.995.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.261.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.261.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.039.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.039.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	18.467.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	18.467.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Lap	3.340.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Lap	3.340.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.737.802.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.737.802.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	7.733.202.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	7.733.202.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	2.300.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok	2.300.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dok	2.300.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	875.308.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	875.308.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	58.090.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	58.090.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	505.613.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	505.613.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2.750.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2.750.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	308.855.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	308.855.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	272.730.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pontianak	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	272.730.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.534.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.534.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	52.568.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	52.568.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.290.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.290.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.860.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.860.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dok	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dok	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	129.508.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	129.508.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	132.486.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	132.486.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	132.486.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	132.486.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	396.749.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pontianak	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	396.749.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	44.226.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	44.226.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	56.696.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	56.696.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	9 Lap	295.827.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	9 Lap	295.827.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94.860.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	42.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	42.510.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	46.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	46.350.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	1.000.000	
					10.669.522.000					10.669.522.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Inspektorat Kota Pontianak di diskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kota Pontianak. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang tingkat Kota. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ditujukan kepada Inspektorat selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan SKPD Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Selain itu berdasarkan hasil rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun ditingkat Nasional, kebanyakan dari usulan yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana KKN. Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak lebih meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindaklanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terhadap Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan di Kota Pontianak. Terdapat 9 (sembilan) prioritas nasional yaitu prioritas Ekonomi, Lingkungan, Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan, Tata Kelola & Reformasi Birokrasi, Kesejahteraan Rakyat, Kewilayahan, Kelautan. Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan tujuan yang selaras dengan prioritas ke-6 (keenam) nasional di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024 s.d. 2026 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Inspektorat Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak yang telah mengacu kepada Kebijakan Nasional Pengawasan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Kota Pontianak juga mendukung Pemerintah Pusat dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas mandatori di daerah yang berskala nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Adapun yang diamanatkan adalah sebagai berikut :

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana.pembangunan jangka menengah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
2	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	1. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	1. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; 2. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; 3. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang undangan; dan 4. Penagihan piutang daerah.
2	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	1. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan 2. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: a) hibah dan bantuan sosial. b) pengadaan barang dan jasa. c) perjalanan dinas.
3	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	1. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2. Pengelolaan deposito; 3. Pengelolaan persediaan; dan 4. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5	Pengelolaan barang milik daerah.	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. Penggunaan; 3. Pemanfaatan; 4. Pengamanan dan pemeliharaan; dan 5. Pemindahtanganan.

3. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

4. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1	Probity audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

No	Fokus	Sasaran
3	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: 1. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; 2. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. Pasca Implementasi: a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2	Pelaksanaan survei penilaian integritas	1. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan 2. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	1. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.

No	Fokus	Sasaran
5	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	1. Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
6	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	1. Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
7	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8	Pemeriksaan investigatif.	1. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
9	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan yang laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	1. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
4	Institusionalisasi Kapabilitas APIP level 3	Dalam rangka institusionalisasi Kapabilitas APIP level 3, 1. Menetapkan ruang lingkup audit kinerja dan menyelesaikan penyusunan perencanaan audit kinerja pada Dinas Perhubungan oleh Irban 1, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang oleh Irban 2, dan Dinas Lingkungan Hidup oleh Irban 3 2. Menyusun PKPT Berbasis Risiko Tahun 2022 dengan mencantumkan rencana kegiatan Pengawasan PBJ Almatkes COVID-19 dan Kegiatan <i>Consulting</i> 3. Memutakhirkan Daftar Risiko Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2021; dan 4. Melakukan <i>Self Assessment</i> Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2021
5	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi certified of government chief audit executive; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
6	Audit BUMD	

Dengan demikian berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional, Inspektorat Kota Pontianak telah menyelaraskan tujuan, tugas dan fungsi serta tugas-tugas mandatori di daerah terhadap kebijakan nasional dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan di Kota Pontianak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)

Tujuan RPD 2024-2026, yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan berdasarkan tujuan RPD dimaksud, maka Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yang terkait, yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- 1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan.
- 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta targetnya yang hendak dicapai pada Rencana Kerja tahun 2025 dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN TAHUN 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 (A)	1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	1. Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)
				2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2. Nilai Maturitas SPIP	3,41

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Kota Pontianak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tersebut, maka perencanaan pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak mengacu pada 4 poin utama pengawasan yaitu; Pengawasan terkait Peningkatan Perekonomian Daerah yang terdiri dari Pemeriksaan Ketaatan dan Pemeriksaan Kinerja. Pengawasan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Reviu Laporan Keuangan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Pengawasan terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas yang terdiri dari Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, serta Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Pengawasan terkait Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3, Maturitas Sistem pengendalian internal pemerintah, Penerapan Manajemen Risiko, dan Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahn Anggaran 2025 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2026
Inspektorat Kota Pontianak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					INSPEKTORAT							10.669.522.000,00				10.682.274.000,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							10.669.522.000,00				10.682.274.000,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							10.669.522.000,00				10.682.274.000,00		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9.540.039.000,00				9.642.591.000,00		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							30.102.000,00				30.102.000,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen	16 Dokumen	100 Persen	5.995.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	5.995.000,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.261.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.261.000,00
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1.039.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.039.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen	3 Laporan	100 Persen	18.467.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.467.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Persen	2 Laporan	100 Persen	3.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.340.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.737.802.000,00					7.575.234.000,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	46 Orang/bulan	100 Persen	7.733.202.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	7.570.634.000,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	2.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.300.000,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	5 Dokumen	100 Persen	2.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	2.300.000,00
6	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							875.308.000,00					1.268.232.000,00
6	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	2 Paket	100 Persen	58.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	58.090.000,00
6	01	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	31 Orang	100 Persen	505.613.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	706.537.000,00
6	01	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Orang	100 Persen	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	139.219.000,00
6	01	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	17 Orang	100 Persen	308.855.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	364.386.000,00
6	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							272.730.600,00					272.730.600,00
6	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Paket	100 Persen	6.534.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.534.200,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	4 Paket	100 Persen	52.568.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.568.300,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	2 Paket	100 Persen	11.290.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.290.500,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Paket	100 Persen	46.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.860.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	2 Paket	100 Persen	24.469.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.600,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	10 Laporan	100 Persen	129.508.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	129.508.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								132.486.800,00					4.682.800,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	15 Unit	100 Persen	132.486.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	4.682.800,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								396.749.600,00					396.749.600,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	3 Laporan	100 Persen	44.226.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	44.226.000,00
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Laporan	100 Persen	56.696.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56.696.000,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	9 Laporan	100 Persen	295.827.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	295.827.600,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								94.860.000,00					94.860.000,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	2 Unit	100 Persen	42.510.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	42.510.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	58 Unit	100 Persen	46.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	46.350.000,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Unit	100 Persen	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Nilai	1 Unit	100 Persen	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000,00
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							567.798.000,00					497.998.000,00
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal							386.798.000,00					316.998.000,00
6	01	02	2.01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
						1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; 100 Persen	37 Laporan	100 Persen	150.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 Laporan	123.450.000,00
6	01	02	2.01	0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	44 Laporan	100 Persen	43.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44 Laporan	20.950.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	129 Laporan	100 Persen	34.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	129 Laporan	14.700.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	1 Laporan	100 Persen	17.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	17.300.000,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	2 Kesepakatan	100 Persen	61.448.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	61.448.000,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	8 Dokumen	100 Persen	79.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen	79.150.000,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							181.000.000,00					181.000.000,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; Persen	2 Laporan	100 Persen	110.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	110.500.000,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					1) Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien ; 2) Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak 1) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP ; 2) Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 ; 100 Persen 100 ; 100 Persen ; 100 Persen	20 Laporan	100 Persen	70.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	70.500.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							561.685.000,00					541.685.000,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							5.775.000,00						5.775.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					1) Level Kapabilitas APIP ; 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	2 Rekomendasi	100 Persen	3.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	3.025.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
					1) Level Kapabilitas APIP ; 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	4 Rekomendasi	100 Persen	2.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	2.750.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							555.910.000,00				535.910.000,00		
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
					1) Level Kapabilitas APIP ; 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	1 perangkat daerah	100 Persen	10.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 perangkat daerah	10.190.000,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
					1) Level Kapabilitas APIP ; 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	32 perangkat daerah	100 Persen	333.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	313.650.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko												
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
						1) Level Kapabilitas APIP : 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatnya Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	8 Kegiatan	100 Persen	206.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	206.700.000,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
						1) Level Kapabilitas APiP ; 2) Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko 1) Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2) Meningkatkan Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 ; 90 Level ; Persen 3 ; 90 Level ; Persen	2 perangkat daerah	100 Persen	5.370.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	5.370.000,00				
TOTAL																			10.669.522.000,00	10.682.274.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 yaitu “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam wujud pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan didukung oleh pendanaan yang berasal dari APBD Kota Pontianak.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Pontianak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan outputnya pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		81 (A)	10.669.522.000	Inspektorat	Kota Pontianak
	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan			Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan		62,50% (20 PD)		Inspektorat	Kota Pontianak
	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendali			Nilai Maturitas SPIP		3,41		Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ian Intern Pemerinta h (SPIP) Terintegra si								
			Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam Implementasi SAKIP yang efektif dan efisien		100	567.798.000	Inspektorat	Kota Pontianak
				Meningkatnya kualitas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak		100		Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal		100	386.798.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah		37	150.250.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah		44	43.950.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		129	34.700.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1	17.300.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk		2	61.448.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		8	79.150.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100	181.000.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah yang Ditangani		2	110.500.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		20	70.500.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP		3	561.685.000	Inspektorat	Kota Pontianak
				Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko		90		Inspektorat	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan		100	5.775.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun		2	3.025.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perumusan kebijakan teknis d bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangFasilitas Pengawasan yang Disusun		4	2.750.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi		100	555.910.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		1	10.190.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		32	333.650.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi		8	206.700.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		2	5.370.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.		95	9.540.039.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100	30.102.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16	5.995.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	1.261.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1.039.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	18.467.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	3.340.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	7.737.802.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46	7.733.202.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	2.300.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		5	2.300.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	875.308.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2	58.090.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		31	505.613.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1	2.750.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		17	308.855.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	272.730.600	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	6.534.200	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	52.568.300	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	11.290.500	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	46.860.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	24.469.600	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2	1.500.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10	129.508.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	132.486.800	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15	132.486.800	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	396.749.600	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	44.226.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	56.696.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		9	295.827.600	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	94.860.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	42.510.000	Inspektorat	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (realisasi 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		58	46.350.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	5.000.000	Inspektorat	Kota Pontianak
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1.000.000	Inspektorat	Kota Pontianak

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah merangkum permasalahan seputar tugas-tugas pengawasan seperti kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal, hasil temuan pemeriksaan yang berulang dan kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal.

Beberapa isu strategis yang muncul sebagai dampak dari permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), manajemen risiko, tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal, Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan (Kapabilitas APIP).

Permasalahan dan isu strategis tersebut telah diformulasikan berdasarkan kaidah dan peraturan-peraturan terkait tugas pengawasan pemerintah daerah sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pemecahan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 ini juga telah disusun berdasarkan peraturan yang mendasarinya sehingga hasil pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan Inspektorat Kota Pontianak 2024-2026 ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"***

Pontianak, Desember 2023
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

